Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
Volume. 2, No. 2, April 2025
e-ISSN : 3046-8124; p-ISSN : 3046-8817, Hal. 121-142
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1430
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Pengaruh Tingkat Implementasi IPSAS Berbasis Akrual Terhadap Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat
(Studi Komparatif Negara OECD, Non-OECD, BRICS)

Muhamad Dimas Pangestu[1*], Saring Suhendro[2]
[1-2] Universitas Lampung, Indonesia

JL.Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Korespondensi penulis: m.dimaspangestu02@email.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of the level of implementation of accrual-based International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on the fiscal transparency of the central government. In addition, this study also examines the differences in the level of IPSAS implementation among OECD, non-OECD, and BRICS countries. The study sample consisted of 20 countries selected through a purposive sampling technique based on three main criteria: (1) the central government has used accrual-based financial reports, either partially or fully; (2) the country has implemented IPSAS for more than five years; and (3) the country is listed in the Open Budget Survey. This study uses panel data covering the years 2015, 2017, 2019, 2021, and 2023. The independent variable in this study is the level of implementation of accrual-based IPSAS as measured by three main indicators: commitment to accruals, accrual reporting, and accrual policies. Meanwhile, the dependent variable, fiscal transparency, is measured using the Open Budget Index score, which reflects the level of openness of the central government budget to the public. The analysis was conducted using panel data regression with a random effects model approach. The results show that the level of accrual-based IPSAS implementation has a positive effect on fiscal transparency, but this effect is not statistically significant. However, there are significant differences in the level of IPSAS implementation among OECD, non-OECD, and BRICS countries. This finding indicates that IPSAS implementation in various countries is influenced by different institutional factors and fiscal capacities, thus requiring strong institutional support to promote more effective fiscal openness.*

Keywords: *Accrual IPSAS, BRICS, Fiscal Transparency, Non-OECD, OECD*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat implementasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini juga menguji perbedaan tingkat implementasi IPSAS di antara kelompok negara OECD, non-OECD, dan BRICS. Sampel penelitian terdiri dari 20 negara yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria utama: (1) pemerintah pusat telah menggunakan laporan keuangan berbasis akrual, baik secara sebagian maupun penuh; (2) negara telah mengimplementasikan IPSAS selama lebih dari lima tahun; dan (3) negara tersebut tercantum dalam *Open Budget Survey*. Penelitian ini menggunakan data panel dengan cakupan tahun 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual yang diukur melalui tiga indikator utama, yaitu: komitmen terhadap akrual, pelaporan akrual, dan kebijakan akrual. Sementara itu, variabel dependen berupa transparansi fiskal diukur dengan menggunakan skor *Open Budget Index* yang mencerminkan tingkat keterbukaan anggaran pemerintah pusat kepada publik. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual memiliki pengaruh positif terhadap transparansi fiskal, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat implementasi IPSAS di antara kelompok negara OECD, non-OECD, dan BRICS. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi IPSAS di berbagai negara dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kapasitas fiskal yang berbeda, sehingga diperlukan dukungan institusional yang kuat untuk mendorong keterbukaan fiskal yang lebih efektif.

Kata Kunci: BRICS, IPSAS Akrual, Non-OECD, OECD, Transparansi Fiskal

1. LATAR BELAKANG

Transparansi fiskal menjadi fondasi penting dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Di banyak negara, keterbukaan dalam pelaporan keuangan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas, tetapi juga menjadi syarat mutlak untuk

Received: Juni 15, 2025; Revised: Juni 30, 2025; Accepted: Juli 28, 2025; Published: Juli 30, 2025

memperoleh kepercayaan publik. Menurut IMF, transparansi fiskal adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi fiskal yang akurat dan dapat diakses oleh publik. Sayangnya, meskipun penting, banyak negara masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang transparan. Permasalahan ini diperburuk oleh kepentingan politik dan keterbatasan kapasitas institusional, yang sering kali memengaruhi kualitas dan objektivitas pelaporan keuangan pemerintah.

Sebagai respons atas tuntutan global terhadap tata kelola yang lebih baik, banyak negara mengadopsi reformasi pengelolaan keuangan publik melalui standar internasional, salah satunya adalah *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) berbasis akrual. IPSAS berbasis akrual dianggap sebagai pendekatan paling modern dalam akuntansi sektor publik karena tidak hanya mencatat transaksi berbasis kas, tetapi juga mencerminkan posisi keuangan pemerintah secara menyeluruh, termasuk aset, kewajiban, dan transaksi non-kas lainnya. Standar ini dikembangkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memperkuat akuntabilitas serta transparansi publik.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi pelopor dalam penerapan IPSAS secara progresif, di mana sebagian besar anggotanya telah mengintegrasikan standar ini dalam sistem keuangan nasional mereka. Sebaliknya, negara-negara Non-OECD dan kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari keterbatasan teknis, resistensi birokrasi, hingga hambatan politik dalam mengimplementasikan IPSAS secara menyeluruh. Meskipun demikian, negara-negara seperti Georgia dan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan skor *Open Budget Index* (OBI), yang merefleksikan peningkatan transparansi fiskal seiring dengan adopsi IPSAS.

Variasi tingkat adopsi IPSAS antarnegara juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya administratif dan sistem hukum. Di Eropa misalnya, beberapa negara seperti Swiss mengadopsi IPSAS secara penuh dalam hukum nasional, sementara negara lain seperti Austria dan Prancis menyesuaikan standar tersebut agar tetap selaras dengan sistem lokal. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IPSAS tidak hanya bergantung pada kemauan politik, tetapi juga pada konteks regulasi dan kelembagaan di masing-masing negara.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti hubungan antara penerapan IPSAS dan transparansi fiskal. Kartiko et al. (2018) menemukan bahwa IPSAS memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi fiskal di tingkat pemerintah pusat. Namun, hasil

yang berbeda ditemukan oleh Balogun & Fatogun (2022) yang menyebutkan bahwa meskipun IPSAS meningkatkan akuntabilitas, dampaknya terhadap transparansi fiskal belum tentu signifikan. Begitu pula Castañeda-Rodríguez (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi politik dan kebebasan media bisa menjadi faktor yang lebih kuat dibanding sekadar penerapan IPSAS. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi IPSAS dalam konteks yang lebih luas dan melalui pendekatan komparatif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menguji pengaruh tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat dengan menggunakan pendekatan komparatif antara negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam literatur akuntansi sektor publik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan organisasi internasional dalam merancang strategi reformasi keuangan publik yang lebih efektif dan kontekstual.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasari oleh sejumlah teori yang saling melengkapi dalam memahami hubungan antara tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual dan transparansi fiskal pemerintah pusat. Teori isomorfisme institusional menjelaskan bahwa organisasi atau negara akan cenderung meniru struktur dan praktik negara lain yang dianggap berhasil, sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan internal, baik secara koersif, mimetik, maupun normatif. Dalam konteks ini, adopsi IPSAS sering terjadi karena dorongan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF, OECD, atau Bank Dunia, serta pengaruh dari negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkannya. Selain itu, teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah (sebagai agen) memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi fiskal kepada masyarakat (sebagai prinsipal), dan bahwa penerapan IPSAS dapat mengurangi ketimpangan informasi yang menyebabkan biaya keagenan tinggi. Sementara itu, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerapan IPSAS juga berperan sebagai bentuk upaya negara memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat serta komunitas internasional melalui peningkatan transparansi fiskal.

Tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual sendiri merupakan ukuran sejauh mana suatu negara telah mengadopsi dan menerapkan IPSAS dalam sistem pelaporan keuangannya. Implementasi ini diukur melalui tiga aspek, yakni komitmen terhadap akrual (misalnya melalui kebijakan atau dokumen resmi), kualitas laporan akrual (dalam hal jumlah komponen laporan yang disusun), dan kebijakan transaksi akrual (jumlah kategori transaksi yang telah berbasis

akrual). IPSAS dirancang oleh IPSASB untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik dengan pendekatan pelaporan berbasis akrual, yang tidak hanya mengandalkan pencatatan kas tetapi juga memperhitungkan seluruh aset dan kewajiban.

Transparansi fiskal sebagai variabel dependen dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana pemerintah terbuka dalam menyampaikan informasi fiskal secara akurat, lengkap, dan dapat diakses publik. IMF dan berbagai penelitian terdahulu sepakat bahwa transparansi fiskal adalah indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat mendorong efisiensi pengelolaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik. Dalam mengukur transparansi fiskal, penelitian ini menggunakan skor *Open Budget Index* (OBI) dari IBP yang menilai berbagai aspek keterbukaan anggaran pemerintah pusat.

Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi PDB per kapita, indeks korupsi, dan indeks demokrasi. PDB per kapita digunakan sebagai proksi kemampuan ekonomi negara dan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas tata kelola fiskal. Indeks korupsi mengukur persepsi publik terhadap korupsi di sektor publik, dan memiliki korelasi negatif dengan tingkat transparansi. Sementara itu, indeks demokrasi menjadi variabel penting untuk menggambarkan sejauh mana sistem pemerintahan negara mendukung transparansi fiskal, di mana negara dengan tingkat demokrasi tinggi umumnya lebih terbuka terhadap publik.

Banyak penelitian terdahulu mendukung keterkaitan antara adopsi IPSAS dengan peningkatan transparansi fiskal, Kartiko et al. (2018) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara keduanya melalui pengukuran tingkat akrual dan skor OBI. Namun, penelitian seperti Castañeda-Rodríguez (2022) dan Balogun & Fatogun (2022) menemukan bahwa pengaruh IPSAS bisa jadi tidak signifikan, tergantung pada faktor kontekstual seperti partisipasi politik, kebebasan media, atau kapasitas kelembagaan. Penelitian oleh Felix Idoko (2018) dan Badze & Shumba (2024) menunjukkan bahwa implementasi IPSAS membutuhkan dukungan regulasi dan sumber daya yang memadai untuk memberikan efek terhadap transparansi. Beberapa studi lainnya, seperti Polzer et al. (2022), bahkan menunjukkan bahwa variasi implementasi IPSAS di Eropa lebih dipengaruhi oleh karakteristik politik dan administratif masing-masing negara, bukan karena status keanggotaan di OECD atau BRICS.

Oleh karena itu, penelitian ini membangun dua hipotesis utama. Pertama, tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual diperkirakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat. Kedua, terdapat perbedaan signifikan tingkat implementasi IPSAS di antara negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui ketiga teori yang telah dijelaskan, yang menyiratkan bahwa struktur

institusi, tekanan internasional, serta kebutuhan legitimasi akan membentuk keragaman dalam penerapan IPSAS dan hasil transparansi fiskalnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat di berbagai negara. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan antar variabel numerik secara objektif dan sistematis, serta memungkinkan penggunaan data sekunder dalam skala internasional. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan, penelitian ini menggunakan data panel dengan rentang waktu lima tahun, yaitu tahun anggaran 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh negara anggota PBB, yaitu sebanyak 193 negara. Namun, penentuan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan menerapkan tiga kriteria utama: negara harus telah menerapkan akuntansi berbasis akrual (baik sebagian maupun penuh), telah menggunakan IPSAS selama lebih dari lima tahun, serta tercantum dalam *Open Budget Survey*. Kriteria ini dipilih untuk memastikan bahwa negara-negara sampel memiliki tingkat kematangan yang memadai dalam implementasi standar pelaporan keuangan sektor publik dan transparansi fiskalnya dapat diukur secara kredibel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti *International Budget Partnership* (IBP) untuk skor transparansi fiskal melalui *Open Budget Index* (OBI), serta dari publikasi IMF, OECD, World Bank, dan situs resmi pemerintah negara-negara sampel untuk data terkait IPSAS dan indikator kontrol lainnya. Data pendukung seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, Indeks Demokrasi, dan Indeks Korupsi diperoleh dari database internasional seperti *World Bank* dan *The Economist Intelligence Unit*.

Variabel yang dianalisis terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel independen utama, dan tiga variabel kontrol. Variabel dependen adalah transparansi fiskal yang diukur melalui skor OBI, yang diklasifikasikan dalam lima tingkat ketersediaan informasi publik. Sementara itu, variabel independen adalah tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual, yang diukur berdasarkan tiga aspek utama: komitmen akrual (skala 1–3), laporan akrual (skala 0,0–1,0), dan kebijakan transaksi akrual (skala 0,0–1,0). Variabel kontrol yang digunakan meliputi PDB per kapita dalam satuan USD, skor Indeks Korupsi (CPI) dengan skala 0–100, dan Indeks Demokrasi dengan skala 0–10.

Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis regresi data panel karena metode ini memungkinkan pengamatan lintas negara (*cross section*) dan waktu (*time series*) secara simultan. Model regresi ditentukan melalui serangkaian uji spesifikasi model yang mencakup uji Chow (untuk memilih antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*), uji Hausman (untuk memilih antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*), serta uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier (untuk memastikan model terbaik antara *Random Effect* dan *Common Effect*). Setelah model terbaik ditentukan, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model, mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji z (parsial) untuk mengukur pengaruh signifikan variabel independen terhadap transparansi fiskal, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dan kontrol dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ANOVA juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat implementasi IPSAS antar kelompok negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik STATA versi 17.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 20 negara yang memenuhi kriteria purposive sampling, yakni telah menerapkan akuntansi akrual berbasis IPSAS, terdaftar dalam Open Budget Survey, dan memiliki komitmen lebih dari lima tahun terhadap implementasi IPSAS. Data dikumpulkan pada lima titik waktu, yaitu tahun 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023, sehingga total observasi adalah 100 data panel. Analisis dilakukan menggunakan STATA 17, dengan pendekatan regresi data panel dan uji ANOVA.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Skewness	Kurtosis
Y	100	0	89	66,31	19,59	0,00	0,00
X	100	1	23	14,97	6,64	0,01	0,07
PDB per kapita	100	1584	82769,41	27620,94	21550	0,14	0,00
Indeks Korupsi	100	27	91	56,27	20,42	0,57	0,00
Indeks Demokrasi	100	5,81	9,61	7,69	1,02	0,54	0,00

Variabel Y transparansi fiskal yang diukur melalui skor *open budget index* (OBI) memiliki penilaian rata-rata adalah 66,31. Menurut kategorisasi OBI, penilaian ini berada dalam klasifikasi "*Substantial Information Available*," yang menandakan bahwa, secara umum, negara-negara dalam sampel telah menyebarluaskan informasi anggaran dengan keterbukaan yang cukup besar kepada publik. Namun demikian, nilai minimum 0 menunjukkan bahwa ada negara dengan tingkat transparansi yang sangat rendah atau bahkan ketersediaan yang tidak ada sama sekali, sedangkan nilai maksimum 89 menandakan bahwa ada negara yang menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam tata kelola fiskal mereka.

Variabel X yaitu tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual memiliki nilai rata-rata agregat dari tiga aspek pengukuran tingkat implementasi IPSAS (komitmen akrual, laporan akrual, dan kebijakan akrual) adalah 14,97 dari skor maksimum 23. Angka ini menandakan bahwa mayoritas negara dalam sampel telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan IPSAS, meskipun mereka belum mencapai implementasi penuh. Rentang nilai dari 1 hingga 23 menunjukkan perbedaan besar di antara negara-negara mengenai adopsi dan pelaksanaan IPSAS. Nilai minimum yang sangat rendah menunjukkan keberadaan suatu negara yang baru pada fase komitmen awal, sedangkan nilai maksimum menunjukkan penerapan atau implementasi IPSAS berbasis akrual yang luas di seluruh aspek yang dinilai.

Variabel kontrol PDB per kapita memiliki nilai rata-rata dari seluruh sampel negara sebeanyak USD 27.620,94 yang menyatakan bahwa terdapat campuran antara negara maju dan negara berkembang dalam sampel. Nilai minimum USD 1.584 dan maksimum USD 82.769,41 semakin memperkuat adanya heterogenitas dalam kapasitas fiskal antar negara. Hal ini penting untuk dikontrol dalam analisis regresi agar pengaruh tingkat kekayaan negara terhadap transparansi fiskal dapat diisolasi.

Variabel kontrol indeks korupsi memiliki nilai rata-rata sebanyak 56,27 menunjukkan bahwa negara-negara dalam sampel memiliki tingkat persepsi terhadap korupsi yang tergolong sedang hingga cukup bersih. Dengan rentang nilai dari 27 hingga 91, terlihat jelas adanya variasi tingkat integritas antar negara. Negara dengan skor tinggi menunjukkan tata kelola pemerintahan yang relatif bersih, sedangkan skor rendah mencerminkan risiko korupsi yang lebih tinggi, yang dapat berdampak pada rendahnya transparansi fiskal.

Variabel kontrol indeks demokrasi memiliki nilai rata-rata sebanyak 7,69 pada skala 0–10, yang menyatakan jika secara umum, negara-negara dalam penelitian ini memiliki sistem politik yang cukup demokratis. Nilai minimum 5,81 dan maksimum 9,61 menunjukkan bahwa sebagian besar negara dalam sampel berada pada kategori demokrasi menengah hingga tinggi, tanpa kehadiran negara dengan sistem otoriter. Hal ini mencerminkan peran penting demokrasi

sebagai elemen pendukung transparansi fiskal yang lebih baik. Pada nilai *skewness* dan *kurtosis* dari masing-masing variabel masih berada dalam batas tolerasi normalitas, sehinggga masing-masing variabel masih memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Hasil Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan pilihan antara dua model regresi data panel yaitu *fixed effect model* (FEM) dan *common effect model* (CEM). Uji ini penting untuk mengetahui apakah perlu mempertimbangkan adanya perbedaan efek tetap (*fixed effect*) antar unit cross-section (dalam hal ini negara) atau tidak. Berikut merupakan hasil dari uji chow.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Keterangan	Nilai
Model yang diuji	*Fixed Effect Model* & *Common Effect Model*
Jumlah Observasi	100
Jumlah unit cross-section	20
F-statistik (F-test)	5,80
Probabilitas (P-value)	0,00
Hasil	H_1 (< 0,05)
Keputusan	*Fixed Effect Model*

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect*, nilai statistik-F 5,80 dipastikan dengan probabilitas atau *p-value* = 0,00. Karena nilai probabilitas ini kurang dari ambang signifikansi 0.05, ada bukti yang memadai untuk mengabaikan hipotesis nol, yang menyatakan bahwa model *Common Effect Mode*l (CEM) sudah memadai karena semua efek individual sama dengan nol—ditolak. Penolakan ini menegaskan bahwa terdapat heterogenitas spesifik pada tiap negara yang secara statistik signifikan memengaruhi transparansi fiskal, sehingga pendekatan yang paling tepat untuk regresi data panel ini adalah *fixed effect model* (FEM).

Hasil Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model regresi panel terbaik antara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara koefisien regresi yang dihasilkan oleh kedua model, berikut merupakan hasil uji hausman.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Keterangan	Nilai
Model yang diuji	*Fixed Effect Model* & *Random Effect Model*
Jumlah Observasi	100
Jumlah unit cross-section	20
Chi-Square	1,95
Probabilitas (P-value)	0,58
Hasil	H_0 (> 0,05)
Keputusan	*Random Effect Model*

Menurut hasil uji hausman yang diilustrasikan pada table 3 diatas, nilai statistik *chi-square* = 1,95 dan nilai probabilitas atau *p-value* = 0,58. Mengingat bahwa nilai probabilitas melebihi ambang signifikansi 0,05, maka hipotesis nol diterima. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan signifikan antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model* (REM) karena efisiensinya yang tinggi dan tidak adanya indikasi bias yang timbul dari korelasi antara variabel independen dan efek individu.

Uji Breusch-Pagan (LM Test)

Uji breusch-pagan atau lagrange multiplier (LM Test) dilakukan untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai antara *common effect model* (CEM) dan *random effect model* (REM), khususnya ketika hasil uji hausman menunjukkan *Fixed Effect Model* (FEM) tidak lebih baik dibanding *random effect model* (REM), ditandai dengan *p-value* > 0,05. Berikut merupakan hasil uji Breusch-Pagan (LM Test).

Tabel 4. Hasil Uji LM

Keterangan	Nilai
Model yang diuji	*Common Effect Model* & *Random Effect Model*
Jumlah Observasi	100
Jumlah unit cross-section	20
Nilai chibar²(01)	44,44
Probabilitas (P-value)	0,00
Hasil	H_1 (< 0,05)
Keputusan	*Random Effect Model*

Berdasarkan hasil uji LM, diperoleh nilai *chibar²* sebesar 44,44 dan *p-value* sebesar 0,00. Karena *p-value* < 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM).

Pemilihan REM juga sejalan dengan hasil uji hausman sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara estimasi *fixed effect* dan *random effect* (*p-value* Hausman = 0,58 > 0,05), sehingga *random effect model* dapat diterima. Maka, model yang digunakan dalam analisis regresi panel pada penelitian ini adalah *random effect model* (REM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

	Obs	Pr (Skewness)	Pr (Kurtosis)
Y	100	0,00	0,00
X	100	0,01	0,07
PDB per kapita	100	0.14	0,00
Indeks Korupsi	100	0,57	0,00
Indeks Demokrasi	100	0,54	0,00

Berdasarkan hasil uji normalitas, semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki nilai *skewness* dan *kurtosis* yang tidak melebihi batas toleransi. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika data residual atau data sisa dalam model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga model dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya tanpa perlu melakukan transformasi tambahan terhadap data.

Hasil Uji Multikolonearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonearitas

	VIF
Indeks Demokrasi	5,77
Indeks Korupsi	5,60
PDB per kapita	4,05
X	1,41
Mean VIF	4,21

Hasil uji multikolinearitas menyatakan adanya masalah serius pada indeks korupsi, dengan nilai VIF sebesar 15,29, yang melebihi batas toleransi (VIF > 10), sehingga perlu dilakukan transformasi data pada variabel kontrol indeks korupsi.

Sebagai langkah perbaikan dilakukan transformasi data terhadap variabel kontrol indeks korupsi yang dimana tujuannya yaitu agar dapat diuji multikolonearitas kembali pada *software* STATA 17. Setelah transformasi, hasil VIF juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. VIF untuk variabel normal indeks korupsi menurun menjadi 5,60 dan seluruh

variabel memiliki VIF dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas berhasil diatasi. Dengan demikian, perbaikan pada variabel indeks korupsi melalui transformasi terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas model, baik dari sisi statistik maupun diagnostik asumsi klasik, sehingga model menjadi lebih layak untuk digunakan dalam interpretasi dan pembahasan lebih lanjut.

Hasil Uji Heterokedatisitas dan Uji Autokorelasi

Untuk meningkatkan ketepatan akurasi estimasi dan menghindari pelanggaran dalam uji asumsi klasik terutama pada uji heterokedatisitas dan uji autokorelasi peneliti menggunakan *robust standard error*. Jika terdapat heterokedatisitas, standard error biasa atau tradisional akan bias, yang dapat menyebabkan uji parsial menjadi tidak valid. Dengan *robust standard error* dapat memperbaiki standard error agar tetap konsisten meskipun terdapat heterokedastisitas. Hal ini sejalan seperti yang dinyatakan oleh Ananta et al. (2023) bahwasannya *robust standar error* dapat digunakan dalam mengatasi masalah heterokedatisitas dan autokorelasi dalam model regresi sehingga model ini dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat.

Penggunaan *robust standard error* memungkinkan perolehan nilai *standard error* yang lebih konsisten dan tepat tanpa mengubah nilai koefisien regresi, sehingga analisis peneliti menjadi lebih valid. Penggunaan *robust standard error* dapat dengan mudah digunakan dengan mudah dalam regresi data panel hanya dengan menambahkan kata "*robust*" pada perintah STATA, sehingga dapat mengantisipasi masalah heterokedatisitas dan autokorelasi. Berikut merupakan hasil regresi data panel *random effect model* dengan *robust standard error*.

Tabel 7. Hasil Random Effect Model dan Robust

Y	Coefficient	Std. Error	z	P>|z|
X	0,81	0,50	1,61	0,10
PDB per kapita	0,00	0,00	0,36	0,71
Indeks Korupsi	-7652,41	23570,85	-0,32	0,74
Indeks Demokrasi	-0.33	5,47	-0,06	0,95
Konstanta	58,91	52,03	1,13	0,25

Pada output dari *random effect model* dengan *robust standard error*, diperoleh jika variabel X yaitu tingkat implementasi IPSAS memiliki koefisien sebanyak 0,81 dengan *p-value* = 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, meskipun hubungan tersebut belum signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Namun demikian, *p-value* yang mendekati 0,10 menunjukkan bahwa terdapat indikasi hubungan yang cukup kuat secara statistik pada tingkat signifikansi 10%, sehingga hasil ini masih relevan untuk dianalisis lebih lanjut sebagai hubungan potensial yang layak ditelusuri.

Selanjutnya, tiga variabel kontrol yang digunakan dalam model, yaitu PDB per kapita, indeks korupsi yang telah ditransformasi, dan indeks demokrasi, secara keseluruhan tidak menyatakan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Koefisien untuk variabel PDB per kapita adalah 0,00 dengan *p-value* = 0,71, menunjukkan bahwa perubahan dalam PDB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dalam model ini. Demikian pula, variabel indeks korupsi yang memiliki koefisien sebesar -7652,41 dengan *p-value* = 0,74, yang mengindikasikan bahwa meskipun arah pengaruhnya negatif sesuai ekspektasi teoritis, hubungan tersebut tidak signifikan. Adapun Indeks Demokrasi memiliki koefisien -0,33 dan *p-value* = 0,95, menunjukkan tidak adanya hubungan yang berarti antara tingkat demokrasi dan variabel Y.

Koefisien konstanta dalam model adalah sebanyak 58,91, namun *p-value* hanya sebanyak 0,25, yang juga menyatakan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa dalam *random effect model* dengan *robust standard error*, hanya variabel X yang menunjukkan arah hubungan positif yang cukup konsisten terhadap transparansi fiskal, meskipun dengan tingkat signifikansi yang masih belum memenuhi syarat signifikansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika tingkat implementasi IPSAS memiliki potensi pengaruh terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat, sementara variabel kontrol dalam model ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabel Y.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji z (Uji Parsial)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat (H1). Dalam penelitian ini, uji parsial dilakukan menggunakan pendekatan regresi data panel dengan *random effect model* dan *robust standard error*. Dikarenakan menggunakan *robust standard error* dan struktur data panel, maka pengujian signifikansi secara parsial dilakukan menggunakan uji z, bukan uji t sebagaimana pada regresi OLS (*Common Effect Model*). Berikut merupakah hasil uji parsial model regresi efek acak dengan *robust standard error*.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Y	Coefficient	Std. Error	z	P>|z|
X	0,81	0,50	1,61	0,10
PDB per kapita	0,00	0,00	0,36	0,71
Indeks Korupsi	-7652,41	23570,85	-0,32	0,74
Indeks Demokrasi	-0.33	5,47	-0,06	0,95

Konstanta	58,91	52,03	1,13	0,25

Temuan regresi menjelaskan jika variabel tingkat implementasi IPSAS, memiliki koefisien positif sebanyak 0,81 dengan nilai z sebanyak 1,61 dan *p-value* (P>|z|) 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa secara arah, peningkatan tingkat implementasi IPSAS berpotensi meningkatkan nilai variabel dependen Y. Meskipun secara statistik belum signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, namun *p-value* yang mendekati ambang batas signifikansi yaitu 0,10 dapat diinterpretasikan bahwa variabel tingkat implementasi IPSAS memiliki pengaruh yang positif namun belum dapat dikatakan signifikan terhadap variabel transparansi fiskal.

Sementara itu, ketiga variabel kontrol yang digunakan dalam model ini, yaitu PDB per kapita, indeks korupsi, dan indeks demokrasi, seluruhnya tidak menyatakan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi fiskal. Koefisien PDB per kapita tercatat sebesar 0,00 dengan *p-value* = 0,71, yang menandakan bahwa variasi dalam tingkat PDB per kapita tidak berdampak signifikan terhadap perubahan transparansi fiskal. Selanjutnya, variabel indeks korupsi memiliki koefisien negatif -7652,41 dengan *p-value* = 0,74. Arah koefisien yang negatif ini sebenarnya sejalan dengan ekspektasi teoritis, di mana semakin tinggi tingkat korupsi (semakin rendah integritas tata kelola), maka transparansi fiskal cenderung menurun. Namun, karena *p-value* yang tinggi, maka hubungan tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik. Begitu pula pada indeks demokrasi, yang menunjukkan koefisien -0,33 dan *p-value* 0,95, menandakan jika tingkat demokrasi suatu negara tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap transparansi fiskal. Koefisien konstanta yang tercatat sebesar 58,91 dengan *p-value* = 0,25 juga menyatakan jika nilai rata-rata transparansi fiskal ketika seluruh variabel independen bernilai nol tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak terlalu relevan secara substansi.

Secara keseluruhan, hasil uji parsial menyatakan jika hanya variabel X yang memiliki pengaruh positif terhadap Y, meskipun signifikansinya masih berada pada tingkat 10%. Sementara ketiga variabel kontrol yaitu PDB per kapita, indeks korupsi, dan indeks demokrasi, tidak berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi transparansi fiskal. Hal ini menyatakan bahwa tingkat implementasi IPSAS berpotensi menjadi faktor kunci dalam mendorong transparansi fiskal, lebih kuat daripada variabel lain yang dikontrol dalam model ini meskipun belum signifikan secara statistik.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R-squared) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen (transparansi fiskal) yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam model, termasuk variabel kontrol yang digunakan.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared:	
Within	0,04
Between	0,14
Overall	0,10

Hasil uji koefisien determinasi (*R-squared*) menyatakan tiga jenis nilai, yaitu *R-squared within* sebesar 0,04, *R-squared between* sebesar 0,14, dan *R-squared overall* sebesar 0,10. Nilai *R-squared within* sebanyak 0,04 mengindikasikan jika hanya sekitar 4% variasi dalam variabel transparansi fiskal dapat dijelaskan oleh variasi variabel tingkat implementasi IPSAS dalam satu negara dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan jika model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat terbatas terhadap perubahan internal di masing-masing negara sepanjang periode observasi.

Sementara itu, nilai *R-squared between* sebanyak 0,14 berarti sekitar 14% variasi transparansi fiskal antar negara dapat dijelaskan oleh model. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan *R-squared within*, yang menyatakan bahwa perbedaan karakteristik antar negara memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap variasi transparansi fiskal dibandingkan perubahan dalam satu negara dari waktu ke waktu. Adapun nilai *R-squared overall* sebanyak 0,10 tercapai. ini menyatakan jika sekitar 10% dari variasi transparansi fiskal dapat dijelaskan oleh tingkat implementasi IPSAS dan variabel kontrol yang digunakan dalam model. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 90%, dijelaskan oleh variabel alternatif di luar model atau oleh efek acak.

Nilai ini dikategorikan rendah, yang menandakan bahwa model tersebut belum berhasil menjelaskan transparansi fiskal secara optimal. Namun demikian, dalam penelitian sektor publik nilai *R-squared* yang rendah masih relatif lazim, terutama ketika menggunakan data lintas negara dengan banyak faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol secara komprehensif.

Hasil Uji ANOVA

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat implementasi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) antar tiga kelompok negara, yaitu OECD, BRICS, dan Non-OECD, oleh karena itu penulis menggunakan uji *one-way* ANOVA. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis ke dua (H2) menggunakan uji ANOVA, terlebih dahulu disajikan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual pada masing-masing kelompok negara, yaitu OECD, Non-OECD, dan BRICS. Tabel berikut menyajikan nilai minimal, maksimal, nilai rata-rata

(*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), dan jumlah observasi (*frekuency*) pada tiap kelompok:

Tabel 10. Statistik Deskriptif ANOVA

Kelompok	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Freq.
OECD	1	23	15,88	7,53	12
BRICS	8	17	14,53	3,23	3
Non-OECD	1	17	13,04	6,09	5
Total	1	23	14,97	6,58	20

Statistik deskriptif ini hadir dalam uji ANOVA sebagai langkah awal untuk memberikan pandangan awal mengenai karakteristik data dalam setiap kelompok. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami seberapa besar perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok negara tersebut dan mengamati tingkat variasi data sebelum melanjutkan ke langkah pengujian signifikansi. Dengan adanya statistik deskriptif ini, kita dapat lebih jelas memvisualisasikan apakah perbedaan yang tampak pada rata-rata setiap kelompok cukup signifikan untuk dianggap bermakna atau tidak.

Kelompok negara OECD terdiri dari 12 negara, di mana nilai terendah adalah 1 dan tertinggi mencapai 23. Rata-rata kelompok ini berada di angka 15,88, yang mengindikasikan bahwa nilai variabel untuk OECD umumnya lebih tinggi dibanding kedua kelompok lainnya. Namun, dengan deviasi standar yang mencapai 7,53, terlihat bahwa terdapat variasi yang signifikan antar negara di dalam kelompok OECD tersebut. Di sisi lain, kelompok BRICS mencatat nilai terendah sebesar 8 dan nilai tertinggi 17, dengan rata-rata 14,53 serta deviasi standar 3,23. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data dalam kelompok BRICS lebih terpusat atau tidak terlalu jauh dari rata-ratanya. Karena kelompok ini hanya terdiri dari 3 negara, sifat homogen ini mungkin dipengaruhi oleh jumlah observasi yang terbatas.

Sementara itu, kelompok Non-OECD memiliki nilai terendah 1 dan tertinggi 17, dengan rata-rata 13,04 serta deviasi standar 6,09 dari 5 negara yang ada. Meskipun rata-ratanya lebih rendah dibandingkan kedua kelompok lain, variasi data dalam kelompok ini tetap cukup signifikan, meskipun tidak sebesar pada kelompok OECD.

Apabila data dari ketiga kelompok digabungkan, yang berjumlah 20 negara, rata-rata keseluruhannya menjadi 14,97, dengan deviasi standar 6,58, dan nilai terendah dan tertinggi masing-masing adalah 1 dan 23. Hal ini menyatakan jika secara global, nilai variabel penelitian memiliki penyebaran yang cukup luas dengan kecenderungan mendekati angka 15. Nilai minimum dan maksimum total ini dihasilkan melalui penggabungan seluruh data, di mana nilai

1 adalah nilai terendah yang terjadi di kelompok OECD maupun Non-OECD, sedangkan nilai 23 merupakan nilai tertinggi dari kelompok OECD.

Tabel 11. Hasil Uji ANOVA

Source	SS	Df	Mean Square	F	Prob > F
Between Groups	29,20	2	14,60	0,31	0,73
Within Groups	793,53	17	46,67		
Total	822,74	19	43,30		

Hasil uji ANOVA menyatakan jika nilai *Sum of Squares Between Groups* adalah 29,20 dengan nilai df sebesar 2, sehingga menghasilkan nilai *mean square between* sebesar 14,60. Angka ini mencerminkan variasi rata-rata di antara kelompok (OECD, BRICS, Non-OECD). Sementara itu, nilai *Sum of Squares Within Groups* (*SS Within*) sebanyak 793,53 dengan nilai df 17, menghasilkan nilai *mean square within* sebanyak 46,67, menyatakan ada variasi nilai dalam masing-masing kelompok negara. Uji ANOVA membandingkan variasi antar kelompok (between groups) dengan variasi dalam kelompok (*within groups*) untuk melihat apakah perbedaan rata-rata antar kelompok signifikan. Dari hasil perbandingan tersebut, diperoleh nilai F sebanyak 0,31, yang cukup rendah, dan nilai probabilitas *Prob > F* sebanyak 0,73, yang jauh melampaui tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti variasi antar kelompok negara tidak lebih besar secara signifikan dibandingkan variasi di dalam kelompok.

Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan rata-rata tingkat implementasi IPSAS di ketiga kelompok (OECD 15,88; BRICS 14,53; Non-OECD 13,04), perbedaan tersebut tidak cukup besar untuk dikatakan signifikan karena penyebaran data dalam kelompok juga cukup besar, terutama terlihat dari nilai *mean square within* yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai *mean square between*. Oleh karena itu, tidak terdapat bukti yang kuat untuk mendukung klaim bahwa kelompok-kelompok itu memiliki nilai rata-rata yang berbeda secara statistik terkait variabel yang diteliti.

Analisis Tambahan

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) sebelumnya, ditemukan bahwasannya tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi fiskal. Temuan ini mendorong penulis untuk melakukan justifikasi melalui sebuah analisis tambahan guna mengevaluasi pengaruh apabila data dikelompokan berdasarkan kategori negara. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya terutama pada penelitian Kartiko et al., (2018) , yang menyatakan pengaruhnya tingkat implementasi IPSAS terhadap transparansi fiskal dengan negara OECD sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, dalam bagian ini dilakukan analisis regresi secara terpisah untuk masing-masing kelompok

negara guna mengidentifikasi apakah terdapat pola pengaruh yang lebih spesifik atau tersembunyi di dalam masing-masing kategori.

Hasil Regresi Kelompok Negara OECD

Tabel 12. Hasil Regresi Kelompok Negara OECD

Y	Coefficient	Std. Error	t	P>|t|
X	4,20	3,21	1,31	0,21
PDB per kapita	-0,00	0,00	-0,41	0,68
Indeks Korupsi	0,27	0,54	0,50	0,62
Indeks Demokrasi	-6,45	11,77	-0,55	0,59
Konstanta	52,41	109,48	0,48	0,64

Hasil regresi dengan pendekatan *fixed effect model* sebagai model yang terpilih dan *robust standard error* pada kelompok negara OECD menunjukan bahwa tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual memiliki *p-value* sebesar 0,21, meskipun nilai koefisien menunjukan arah positif tetapi hal ini tetap tidak dapat mendukung secara signifikan karena *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Diikuti dengan nilai standar error sebesar 3,21 menunjukkan adanya variabilitas yang cukup besar terhadap estimasi koefisien, yang juga menjelaskan mengapa nilai t tidak cukup tinggi untuk mendukung signifikansi hubungan.

Selanjutnya, variabel kontrol PDB per kapita dengan *p-value* sebesar 0,68 , indeks korupsi dengan *p-value* sebesar 0,62, dan indeks demokrasi yang memiliki *p-value* sebesar 0,58, hal ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan.Nilai konstanta sebesar 52,41 juga tidak signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, nilai dasar transparansi fiskal tidak dapat dijelaskan secara kuat oleh model.

Temuan ini konsisten dengan hasil uji hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini, di mana secara agregat, tingkat implementasi IPSAS tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat. Dalam konteks negara OECD, yang umumnya memiliki kerangka kelembagaan dan tata kelola fiskal yang relatif lebih kuat, implementasi IPSAS bukan merupakan satu-satunya faktor dominan dalam mendorong transparansi fiskal. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi transparansi fiskal yaitu tingkat partisipasi politik warga negara dan kebebasan media menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi transparansi (Castañeda-Rodríguez, 2022).

Hasil Regresi Kelompok Negara Non-OECD

Tabel 13. Hasil Regresi Kelompok Negara Non-OECD

Y	Coefficient	Std. Error	t	P>|t|
X	-0,72	1,12	-0,64	0,52
PDB per kapita	-0,00	0,00	-3,63	0,00
Indeks Korupsi	-0,35	0,43	-0,81	0,42
Indeks Demokrasi	-10,66	5,04	-2,11	0,04
Konstanta	161,13	30,01	5,37	0,00

Hasil regresi dengan pendekatan *common effect model* dan *robust standard error* pada kelompok negara Non-OECD, menunjukan bahwa tingkat implementasi IPSAS memiliki koefisien sebanyak -0,72, dengan *p-value* = 0,52 dan t-statistik sebesar -0,64. Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat implementasi IPSAS justru diikuti dengan penurunan transparansi fiskal, namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik karena *p-value* diatas ambang signifikansi 5%, menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan adanya pengaruh antara implementasi IPSAS terhadap transparansi fiskal dalam kelompok negara non-OECD.

Salah satu variabel kontrol, yaitu PDB per kapita, menunjukkan pengaruh yang signifikan secara negatif (*p-value* = 0,00) terhadap transparansi fiskal. Artinya, di antara negara-negara non-OECD, semakin tinggi pendapatan per kapita justru diikuti oleh penurunan skor transparansi fiskal. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan keterbukaan informasi anggaran, terutama di negara-negara yang belum memiliki sistem pelaporan keuangan publik yang kuat. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun secara ekonomi negara tersebut berkembang, tanpa diikuti oleh penerapan akuntansi akrual yang konsisten serta komitmen terhadap reformasi keuangan publik seperti IPSAS, peningkatan PDB belum otomatis menghasilkan tata kelola fiskal yang transparan. Sementara itu, indeks korupsi dan indeks demokrasi juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap transparansi fiskal, namun hanya indeks demokrasi yang signifikan secara statistik dengan *p-value* = 0,04. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada kelompok negara non-OECD, peningkatan skor demokrasi justru disertai dengan penurunan transparansi fiskal.

Hasil Regresi Kelompok Negara BRICS

Tabel 14. Hasil Regresi Kelompok Negara BRICS

Y	Coefficient	Std. Error	t	P>|t|
X	5,30	3,41	1,56	0,15
PDB per kapita	0,00	0,00	3,36	0,00

Indeks Korupsi	0,46	1,21	0,38	0,71
Indeks Demokrasi	44,59	19,39	2,30	0,04
Konstanta	-328,44	111,93	-2,93	0,01

Hasil regresi dengan pendekatan *commond effect model* (CEM) dan *robust standard error* untuk negara BRICS menunjukan bahwa tingkat implementasi IPSAS memiliki koefisien positif sebesar 5,30, dengan *p-value* = 0,15 dan t-statistik sebesar 1,56. Meskipun koefisien menunjukan hubungan positif, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan karena *p-value* yang melebihi ambang signifikansi 5%. Nilai standar error sebesar 3,41 mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam estimasi tersebut, sehingga hubungan tersebut belum cukup kuat untuk disimpulkan secara meyakinkan.

Variabel kontrol PDB per kapita menunjukan hasil hubungan yang signifikan dengan *p-value* = 0,00 diikuti dengan arah koefisien yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa di kelompok negara BRICS, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka transparansi fiskal cenderung meningkat. Sedangkan untuk variabel kontrol indeks korupsi memiliki koefisien sebesar 0,46 dengan *p-value* = 0,71, Walaupun arah hubungan yang ada bersifat positif, itu tidak cukup untuk diakui sebagai pengaruh yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa pandangan mengenai tingkat korupsi di negara-negara BRICS belum menghasilkan pengaruh yang tegas terhadap transparansi fiskal. Ketidakadaan hubungan ini juga bisa menggambarkan bahwa meskipun persepsi terkait korupsi mengalami perubahan, hal ini tidak selalu tercermin dalam kejelasan informasi keuangan pemerintah.

Sementara indeks demokrasi menunjukkan nilai koefisien yang tinggi dan secara statistik signifikan (koefisien = 44,59; *p-value* = 0,04). Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam negara-negara BRICS, penguatan demokrasi yang signifikan, yang terwujud melalui kebebasan dalam menyampaikan pendapat, pengawasan legislatif yang dinamis, dan keterlibatan warga yang luas, memiliki peran kunci dalam mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran. Ini sejalan dengan teori legitimasi dan agensi yang digunakan dalam studi ini, yang berpendapat bahwa tata kelola berbasis demokrasi meningkatkan tuntutan akan transparansi fiskal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual terhadap transparansi fiskal pemerintah pusat serta membandingkan tingkat implementasi IPSAS antara kelompok negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan uji ANOVA, diperoleh dua kesimpulan utama. Pertama

tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual memiliki koefisien positif sebeanyak 0,81 dengan p-value sebanyak 0,10 (> 0,05), yang berarti hubungan antara tingkat implementasi IPSAS dan transparansi fiskal bersifat positif namun tidak signifikan secara statistik. Artinya, meskipun ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat implementasi IPSAS maka semakin meningkat pula transparansi fiskal, pengaruh ini belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan.

Kedua Pada hasil uji ANOVA, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat implementasi IPSAS berbasis akrual antara 55 kelompok negara OECD, Non-OECD, dan BRICS. Nilai F sebanyak 0,31 dengan p-value sebesar 0,73 (>0,05) menyatakan jika rata-rata skor tingkat implementasi IPSAS tidak berbeda secara signifikan antar ketiga kelompok negara. Dengan demikian, hipotesis H2 tidak terdukung, meskipun secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok, perbedaan tersebut tidak cukup besar secara statistik untuk disimpulkan sebagai signifikan. Temuan ini menyatakan jika klasifikasi negara berdasarkan kelompok negara OECD, BRICS, atau Non-OECD bukanlah faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya tingkat implementasi IPSAS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, penguji, serta seluruh pihak di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, dukungan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Artikel ini merupakan bagian dari hasil skripsi sarjana yang berjudul "Pengaruh Tingkat Implementasi IPSAS Berbasis Akrual terhadap Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat (Studi Komparatif Negara OECD, Non-OECD, BRICS)". Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada lembaga penyedia data seperti International Budget Partnership, IMF, World Bank, dan OECD yang menyediakan akses terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Ahmaddien, I., & Susanto, B. (2020). *Eviews 9: Analisa regresi data panel* (Bab 1). Ideas Publishing. https://doi.org/10.31237/osf.io/49x7e

Badze, A., & Shumba, F. (2024). Successes and challenges in implementing International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in Zimbabwe: 2019 to date. *International Journal of Finance and Management Research*. http://www.ijfmr.com

Balogun, S. B., & Fatogun, O. I. (2022). Adoption of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on financial accountability and transparency of selected

local governments in Ogun State. *Ife Social Sciences Review, 2022*(2). http://www.issr.oauife.edu.ng/journal

Castañeda-Rodríguez, V. (2022). Is IPSAS implementation related to fiscal transparency and accountability? *Brazilian Administration Review, 19*(1). https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2022210071

Christiaens, J., Vanhee, C., Manes-Rossi, F., Aversano, N., & van Cauwenberge, P. (2014). The effect of IPSAS on reforming governmental financial reporting: An international comparison. *International Review of Administrative Sciences, 81*(1), 158–177. https://doi.org/10.1177/0020852314546580

Cimpoeru, M. V., & Cimpoeru, V. (2015). Budgetary transparency – An improving factor for corruption control and economic performance. *Procedia Economics and Finance, 27*, 579–586. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01036-9

Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32*(8), 2307–2329. https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *Advances in Strategic Management, 17*, 143–166. https://doi.org/10.1016/S0742-3322(00)17011-1

Fahmid, I. M., Harun, H., Graham, P., Carter, D., Suhab, S., An, Y., Zheng, X., & Fahmid, M. M. (2020). New development: IPSAS adoption, from G20 countries to village governments in developing countries. *Public Money & Management, 40*(2), 160–163. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1617540

Idoko, F. I. (2018). International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) in Nigeria as a correlate to transparency and accountability. *Journal of Finance and Accounting, 6*(5), 110. https://doi.org/10.11648/j.jfa.20180605.12

Haque, M. E., & Neanidis, K. C. (2009). *Fiscal transparency and corruption*. University of Manchester, Centre for Growth and Business Cycle Research. http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/cgbcr/discussionpapers/index.html

Helldorff, K., & Christiaens, J. (2023). Harmonising public sector accounting laws and regulations of the European Union member states: Powers and competences. *International Review of Administrative Sciences, 89*(3), 741–756. https://doi.org/10.1177/00208523211060007

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 4*, 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kartiko, S. W., Rossieta, H., Martani, D., & Wahyuni, T. (2018). Measuring accrual-based IPSAS implementation and its relationship to central government fiscal transparency. *Brazilian Administration Review, 15*(4). https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170119

Leroy, R. S. D., Brunozi Júnior, A. C., & Ávila, L. A. C. de. (2021). Países mais transparentes são mais democráticos? *Contabilidade, Gestão e Governança, 24*(1), 130–147. https://doi.org/10.51341/1984-3925_2021v24n1a8

Martí, C., & Kasperskaya, Y. (2015). Public financial management systems and countries' governance: A cross-country study. *Public Administration and Development, 35*(3), 165–178. https://doi.org/10.1002/pad.1711

Montes, G. C., Bastos, J. C. A., & de Oliveira, A. J. (2019). Fiscal transparency, government effectiveness and government spending efficiency: Some international evidence based on panel data approach. *Economic Modelling, 79*, 211–225. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.10.013

Polzer, T., Gårseth-Nesbakk, L., & Adhikari, P. (2020). "Does your walk match your talk?" Analyzing IPSASs diffusion in developing and developed countries. *International Journal of Public Sector Management, 33*(2–3), 117–139. https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2019-0071

Polzer, T., Grossi, G., & Reichard, C. (2022). Implementation of the International Public Sector Accounting Standards in Europe: Variations on a global theme. *Accounting Forum, 46*(1), 57–82. https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1920277

Rincón-Soto, C. A., & Gómez Villegas, M. (2021). El isomorfismo institucional en la adopción de las IPSAS. *Cuadernos de Administración, 36*(68), 204–218. https://doi.org/10.25100/cdea.v36i68.9793

Rodríguez Bolívar, M. P., & Navarro Galera, A. (2012). The role of fair value accounting in promoting government accountability. *Abacus, 48*(3), 348–386. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2011.00352.x

Septiadi, & Ramadhani, W. K. (2020). Penerapan metode ANOVA untuk analisis rata-rata produksi donat, burger, dan croissant pada Toko Roti Animo Bakery. [Unpublished manuscript].

Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. CV Alfabeta.

Ananta, P., Kamal, M. E. bin M., & Mohamed, N. (2023, June 12–13). Public spending, corruption, and human development: Empirical evidence in middle-income countries. In *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023)* (Vol. 131, pp. 561–579). https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.48